

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENDAHULUAN

Tujuan dan Manfaat Laporan Operasional

1. Tujuan Laporan Operasional adalah menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
3. Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
4. Manfaat informasi Laporan Operasional:
 - (a) informasi besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
 - (b) informasi operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan;
 - (c) informasi yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - (d) informasi mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
5. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DEFINISI

6. Definisi-definisi berikut ini digunakan dalam kebijakan akuntansi:

Asas Bruto adalah asas yang menyatakan bahwa pendapatan-LO dan beban dicatat tanpa dikompensasikan (tanpa saling mengurangi).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan/beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi, dan berada di luar kendali entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

PERIODE PELAPORAN

PERIODE PELAPORAN

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

LAPORAN OPERASIONAL

Struktur dan Isi

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- cakupan entitas pelaporan;
- periode yang dicakup;
- mata uang pelaporan; dan
- satuan angka yang digunakan.

PENDAPATAN & BEBAN

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, misalnya: pajak, retribusi, dan sebagainya.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut entitas pelaporan (SKPD dan PPKD) dan entitas akuntansi (SKPD) dikelompokkan menurut jenis pendapatan.

Beban

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain.

Beban Operasi pada PPKD terdiri dari beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, dan beban lain-lain.

Beban Transfer pada PPKD terdiri dari beban transfer bagi hasil pajak daerah, beban transfer bagi hasil retribusi daerah, beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya, dan beban transfer bantuan keuangan.

SURPLUS/DEFISIT & POS LUAR BIASA**Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- (c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LO & TRANSAKSI**SURPLUS/DEFISIT-LO**

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

DEFINISI & KOMPONEN EKUITAS**Definisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Komponen Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- Ekuitas awal;
- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar;
- Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada pos-pos lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KOREKSI & PENYESUAIAN EKUITAS**Surplus/Defisit-LO**

Saldo Surplus/Defisit-LO yang dipindahkan dari Laporan Operasional akan menambah atau mengurangi ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Surplus akan menambah ekuitas, sedangkan defisit akan mengurangi ekuitas.

Koreksi-Koreksi

Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas meliputi:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- Koreksi lainnya yang menambah/mengurangi ekuitas yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam surplus/defisit-LO.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi diungkapkan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan disajikan terpisah.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPD

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN				
	Pendapatan Asli Daerah				
1	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	BEBAN				
	Beban Operasi				
4	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Beban Barang Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
12	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pos Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx	xxx	xxx

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional PPKD Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PPKD

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah					
1	Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
4	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
8	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Provinsi					
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer		xxx	xxx	xxx	xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
12	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx	xxx	xxx

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional PPKD Pemerintah Kabupaten/Kota (Lanjutan)

	BEBAN				
	Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Beban Transfer Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Surplus Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
	Defisit Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Defisit Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
	JML SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
	POS LUAR BIASA				
29	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pos Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx	xxx	xxx

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN				
	Pendapatan Asli Daerah				
1	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	PENDAPATAN TRANSFER				
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
5	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
9	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Transfer Pemerintah Provinsi				
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
13	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota (Lanjutan)

	BEBAN				
	Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Beban Barang Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Beban Transfer Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Surplus Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
	Defisit Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Defisit Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
	JML SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
	POS LUAR BIASA				
34	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pos Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx	xxx	xxx

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Uraian	20X1 (Rp)	20X0 (Rp)
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	xxx	xxx
	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
	Lain-lain	xxx	xxx
4	Ekuitas Akhir (1 + 2 + 3)	xxx	xxx

Laporan Perubahan Ekuitas PPKD

No	Uraian	20X1 (Rp)	20X0 (Rp)
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	xxx	xxx
	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
	Lain-lain	xxx	xxx
4	Ekuitas Akhir (1 + 2 + 3)	xxx	xxx

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Uraian	20X1 (Rp)	20X0 (Rp)
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	xxx	xxx
	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
	Lain-lain	xxx	xxx
4	Ekuitas Akhir (1 + 2 + 3)	xxx	xxx